

## ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SLTA SEDERAJAT DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2012

Wahyu Pujiyanto  
[wahyu.pujiyanto@mail.ugm.ac.id](mailto:wahyu.pujiyanto@mail.ugm.ac.id)

Umi Listyaningsih  
[listyaningsih\\_umi@yahoo.com](mailto:listyaningsih_umi@yahoo.com)

APM SLTA Indonesia 2006–2012 berkisar 50%, menunjukkan hampir setengah penduduk Indonesia belum tuntas SLTA. APM SLTA sederajat Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan gambaran akses dan pemerataan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini: (1) mengetahui capaian APM SLTA sederajat Indonesia dan (2) mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi APM SLTA sederajat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder (BPS). Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan spasial. Tujuan penelitian pertama dilakukan dengan teknik analisa metode interval teratur Sturgess. Tujuan penelitian kedua dilakukan dengan teknik analisa regresi linear berganda 3 prediktor.

Hasil penelitian: (1) Hanya 7 provinsi di Indonesia dengan pendidikan SLTA sederajat berkelas kategori tinggi (APM lebih dari 50%), yaitu N.A.D., Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi tersebut berkelas kategori APM tetap tinggi dari 2006-2012, disebabkan akses ke sekolah mudah, tingginya pendidikan yang telah dicapai masyarakat, dan rendahnya jumlah penduduk miskin. (2) Faktor dominan yang mempengaruhi APM SLTA sederajat di Indonesia yaitu rata-rata lama sekolah.

**Kata kunci :** APM SLTA sederajat, rata-rata lama perjalanan ke sekolah, rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, Indonesia

### **Abstract**

*NER of senior high school Indonesia 2006–2012 around 50%, it almost half of Indonesia's population has'nt completed senior high school. NER of senior high school and equivalent in Indonesia needs to be done provide picture of access and equity in education. Purposes of study: (1) determine achievement of NER of senior high school and equivalent in Indonesia and (2) determine dominant factors affecting NER of senior high school and equivalent in Indonesia.*

*Study used secondary data (Central Bureau of Statistics). Method used is quantitative with Spatial Approach. First purpose of study was done by using analytical method is Sturgess regular intervals. Second purpose was done by using analysis with 3 predictors of multiple linear regression.*

*Study results: (1) Only 7 provinces in Indonesia have a high NER class category of education of senior high school and equivalent (NER more than 50%). They're N.A.D., North Sumatra, West Sumatra, Riau Islands, Special Region of Yogyakarta, Bali, and East Borneo. Those provinces have a category class of high NER constantly from 2006-2012 cause easy access to schools, higher education has been achieved, and low number of poor people. (2) Dominant factors affecting NER of senior high school and equivalent in Indonesia is mean years schooling.*

**Keywords:** *NER of senior high school and equivalent, average time of travel to school, mean years schooling, percentage of poor people, Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Data hasil pemantauan pendidikan “*Education for All Global Monitoring Report 2011*” yang dikeluarkan oleh UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka putus sekolah yang tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan ada 4 anak yang putus sekolah pada setiap menitnya. Ada banyak faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia, yang paling umum dijumpai adalah mahal biaya pendidikan, sehingga para siswa tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini tentu mempengaruhi angka pemerataan pendidikan Indonesia. Salah satu indikator akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari APM.

Angka partisipasi murni (APM) SLTA sederajat di Indonesia tahun 2006–2012 masih berkisar 50%, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia belum tuntas SLTA, padahal rata-rata hampir semua lowongan pekerjaan mengisyaratkan minimal pendidikan SLTA sederajat. Jika banyak yang terserap di dunia pekerjaan maka akan mengurangi angka kemiskinan. Angka partisipasi murni (APM) SLTA Sederajat 2006 – 2012 di Indonesia perlu dilakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai akses dan pemerataan pendidikan yang terjadi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) mengetahui capaian APM SLTA sederajat di Indonesia dan (2) mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi APM SLTA sederajat di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Dalle (1969), dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, baik berlangsung di sekolah

maupun di luar sekolah dan dilakukan sepanjang hayat guna diperlukan baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara dan berguna secara tetap untuk masa depan. Indikator pendidikan menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS (P3Gender LPPM UNS) menjelaskan bahwa kondisi pendidikan yang sedang berjalan pada umumnya menggunakan indikator yang disusun oleh UNESCO. Diukur dari 3 aspek pendidikan, yaitu indikator akses dan pemerataan pendidikan, indikator mutu dan relevansi pendidikan, dan indikator manajemen pendidikan.

Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan. Aspek dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu APS, APK, dan APM. Penelitian ini menggunakan APM. Angka partisipasi murni (APM) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan sesuai dengan usia pada setiap jenjang pendidikan.

Indikator mutu dan relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur pertama, kedua, dan ketiga. Alur pertama yaitu masukan yang terdiri atas kurikulum, siswa atau peserta didik, guru atau tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, dan lainnya. Alur kedua yaitu proses yang meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai bentuk pendidikan.

Alur ketiga yaitu hasil yang akan membuahkan 2 macam hasil, yaitu hasil jangka pendek dan jangka panjang. Hasil jangka pendek yaitu mencakup

kemampuan peserta didik yang dapat diukur melalui prestasi belajar siswa. Hasil jangka panjang yaitu peningkatan mutu lulusan yang dapat dilihat melalui jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan jumlah lulusan yang dapat bekerja. Indikator manajemen pendidikan yaitu hal ini terkait pada aspek manajemen pendidikan. Hal ini meliputi rasio kepala sekolah perempuan terhadap laki-laki, rasio pejabat perempuan terhadap laki-laki di tingkat provinsi/kabupaten/kota, rasio penulis/ilustrator perempuan terhadap laki-laki, dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan manajemen pendidikan.

Jenis pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 yaitu mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 terdiri atas: Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Perguruan Tinggi (PT). Penelitian ini menggunakan jenjang pendidikan SLTA sederajat, dengan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum (SMA), kejuruan (SMK/ MAK), dan keagamaan (MA/ MAK).

Kesenjangan pendidikan menurut Ali (2009) pada jenjang SLTP hingga Perguruan Tinggi terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sekitar 15-20% (BPS, 2004 dalam Ali, 2009). Perbedaan akses terhadap pendidikan ini disebabkan oleh 1) faktor biaya (ekonomi), 2) faktor geografis (jarak tempuh), dan 3) faktor kesadaran masyarakat. Perbedaan akses terhadap pendidikan nantinya akan mempengaruhi angka partisipasi pendidikan, salah

satunya yaitu APM. Tinggi rendahnya APM dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Faktor-faktor penyebab dan pendukung penduduk usia sekolah untuk tidak/melanjutkan pendidikan SMP menurut Zahidy (2008) dalam tesisnya, yaitu 1) faktor geografi (lokasi) sekolah, 2) faktor kesadaran masyarakat, 3) faktor kondisi ekonomi (kemiskinan), dan 4) faktor motivasi masyarakat terhadap pendidikan. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya APM di suatu daerah yaitu: 1) faktor keberadaan sekolah, 2) faktor kesadaran masyarakat, dan 3) faktor kondisi ekonomi (kemiskinan). Asumsi ini diperkuat oleh pernyataan Ali (2009), Zahidy (2008), dan info Mendikdasmen edisi November 2006, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pendidikan, salah satunya yaitu APM, antara lain yaitu 1) faktor keberadaan sekolah, 2) faktor kesadaran masyarakat, dan 3) faktor kondisi ekonomi.

1. Faktor keberadaan sekolah: Keberadaan sekolah merupakan akses penduduk usia sekolah menuju ke sekolah. Hal ini terkait dengan akses dari tempat tinggal menuju ke sekolah. Penelitian ini menggunakan data rata-rata lama perjalanan ke sekolah (RLP) menurut provinsi dalam satuan menit yang bertujuan untuk memperlihatkan akses jalan menuju ke sekolah di suatu daerah.
2. Faktor kesadaran masyarakat: Masyarakat di suatu daerah yang mengerti akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolahnya. Penelitian ini menggunakan data rata-rata lama sekolah (RLS), yang menurut Kumalasari (2012) yaitu mengindikasikan bahwa semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah

masyarakat di suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di daerah tersebut.

3. Faktor kondisi ekonomi (kemiskinan): Akses dan pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh kemiskinan, hal tersebut berdasarkan pada definisi *United Nations Development Programme (UNDP)* yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Penelitian ini menggunakan data persentase penduduk miskin (PPM) yang bertujuan untuk menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan spasial (*Spatial Approach*). Pendekatan spasial menurut Yunus (2008) yaitu suatu cara pandang atau kerangka analisa yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Ruang yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2006–2012. Nantinya dari hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan spasial tersebut akan diketahui provinsi mana saja di Indonesia yang mengalami ketidakmerataan pendidikan dan pemerintah diharapkan untuk fokus ke provinsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan analisa data yaitu metode interval teratur *sturgess* dan regresi linear berganda 3 prediktor. Metode interval teratur *sturgess* digunakan bertujuan untuk mengetahui capaian APM

SLTA sederajat di Indonesia. Selanjutnya, regresi linear berganda 3 prediktor digunakan bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi APM SLTA sederajat di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat di Indonesia Tahun 2006 – 2012**

Terdapat 12 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 48.37%–57.07%) di tahun 2006 yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, D.K.I. Jakarta, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Terdapat 11 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM sedang (berada pada angka 39.67%–48.36%) yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Terdapat 10 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 30.97%–39.66%) yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Terdapat 8 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.57%–62.12 %) di tahun 2009 yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Maluku. Terdapat 12 provinsi yang masuk kedalam klasifikasi kategori APM sedang (berada pada angka 42.99%–52.56%) yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Terdapat 13 provinsi yang

masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 33.41%–42.98%) yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.

Terdapat 15 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.10%–63.55%) di tahun 2012 yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, D.K.I. Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Terdapat 15 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM sedang (berada pada angka 40.63%–52.09%) yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Terdapat 3 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 29.16%–40.62%) yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Hasil penelitian ini dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki klasifikasi kategori APM “tetap tinggi” berturut-turut dari tahun 2006, 2009, dan 2012 yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi tersebut dapat dikatakan untuk pendidikan SLTA sederajatnya hampir tercapai (dominan APMnya lebih dari 50% atau hampir mencapai 100%). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di provinsi-provinsi tersebut mampu bertahan dalam meningkatkan APM di provinsi-provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki klasifikasi kategori APM “tetap rendah” berturut-turut dari tahun 2006, 2009, dan 2012 yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Hal ini membuktikan bahwa ketiga provinsi tersebut mengalami ketidakmerataan pendidikan karena tidak mampu meningkatkan APM di provinsi-provinsi tersebut. Ketiga provinsi tersebut dapat dikatakan untuk pendidikan SLTA sederajatnya belum tercapai (dominan APMnya kurang dari 50% atau jauh dari 50%).

## **2. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat menurut Wilayah Pembagian Indonesia**

Angka partisipasi murni (APM) tertinggi tahun 2006 dan 2009 di wilayah Pulau Sumatera adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan APM masing-masing sebesar 57.07% dan 62.12%. Selanjutnya, APM tertinggi tahun 2012 adalah Kepulauan Riau dengan APM sebesar 63.53%. Di wilayah Pulau Sumatera, APM terendah tahun 2006 – 2012 adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan APM masing-masing sebesar 34.84%, 38.13%, dan 42.93%.

Angka partisipasi murni (APM) tertinggi tahun 2006 – 2012 di wilayah Pulau Jawa adalah D.I. Yogyakarta dengan APM masing-masing sebesar 55.85%, 58.69%, dan 63.54%. Di wilayah Pulau Jawa, APM terendah tahun 2006 dan 2009 adalah Jawa Barat dengan APM masing-masing sebesar 37.84% dan 38.59%. Selanjutnya, APM terendah tahun 2012 adalah Jawa Tengah dengan APM sebesar 51,11%.

Angka partisipasi murni (APM) tertinggi tahun 2006 – 2012 di wilayah Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur dengan APM masing-masing sebesar 50.41%, 53.10%, dan 60.34%. Selanjutnya, APM terendah tahun 2006 dan 2012 adalah Kalimantan Barat dengan APM masing-masing sebesar 34.77% dan

37.44%. Sedangkan APM terendah tahun 2009 adalah Kalimantan Selatan dengan APM sebesar 35,71%. Di wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara, APM tertinggi tahun 2006 – 2012 adalah Bali dengan APM masing-masing sebesar 53.54%, 56.48%, dan 63.55%. Sedangkan APM terendah tahun 2006 – 2012 adalah Nusa Tenggara Timur dengan APM masing-masing sebesar 30.97%, 34.15%, dan 38.19%.

Angka partisipasi murni (APM) tertinggi tahun 2006 dan 2009 di wilayah Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Utara dengan APM masing-masing sebesar 48.78% dan 50.46%. Selanjutnya, APM tertinggi tahun 2012 adalah Sulawesi Selatan dengan APM sebesar 54.20%. Di wilayah Pulau Sulawesi, APM terendah tahun 2006 – 2012 adalah Sulawesi Barat dengan APM masing-masing sebesar 32.35%, 33.41%, dan 44.54%.

Angka partisipasi murni (APM) tertinggi tahun 2006 dan 2009 di wilayah Pulau Maluku dan Papua adalah Maluku dengan APM masing-masing sebesar 55.66% dan 59.58%. Selanjutnya, APM tertinggi tahun 2012 adalah Maluku Utara dengan APM sebesar 54.20%. Di wilayah Pulau Maluku dan Papua, APM terendah tahun 2006 – 2012 adalah Papua dengan APM masing-masing sebesar 33.36%, 35.77%, dan 29.16%.

### **3. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat di Indonesia**

Hasil dari ketiga tabel *correlation* tahun 2006, 2009, dan 2012 menyatakan bahwa variabel rata-rata lama perjalanan ke sekolah (RLP), rata-rata lama sekolah (RLS), dan persentase penduduk miskin (PPM) memiliki cukup hubungan dengan APM. Hubungan RLP dengan APM pada tahun 2012 yaitu berbanding terbalik dan lemah, dengan nilai sig 0.052, melebihi sedikit dari 0.05. Artinya bila APM naik maka RLP turun tapi memiliki hubungan

yang lemah dengan APM. Hasil korelasi antara APM dan RLP pada tahun 2006 dan 2009 tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak memiliki hubungan dengan APM, nilai sig melebihi 0.05. Hal ini disebabkan karena pada data RLP di beberapa provinsi dari tahun 2009 ke 2012 memiliki angka yang tidak cukup stabil dan fluktuatif.

Hubungan RLS dengan APM pada tahun 2006 dan 2009 yaitu berbanding lurus dan kuat, dengan nilai sig 0.002 dan 0.005, (sig < 0.05). Artinya yaitu bila APM naik maka RLS juga akan naik dan memiliki hubungan yang kuat dengan APM. Perbedaan hasil korelasi tiap tahun tersebut disebabkan karena pada data RLS D.K.I. Jakarta, Maluku Utara, dan Papua yang angkanya tidak cukup stabil. Meskipun demikian, hasil korelasi antara APM dan RLS setidaknya dapat ditarik kesimpulan yaitu bila APM naik maka RLS juga naik.

Hubungan PPM dengan APM pada tahun 2006 yaitu berbanding terbalik dan lemah, dengan nilai sig 0.019. Sedangkan pada tahun 2012 yaitu berbanding terbalik dan kuat, dengan nilai sig 0.006. Artinya yaitu bila APM naik maka PPM turun, tapi memiliki hubungan yang lemah (tahun 2006) dan kuat (tahun 2012) dengan APM. Perbedaan hasil korelasi tiap tahun tersebut disebabkan karena pada data PPM D.K.I. Jakarta dari tahun 2009 ke 2012 yang angkanya tidak cukup stabil.

Hasil dari ketiga tabel *coefficients* tahun 2006, 2009, dan 2012 menyatakan bahwa hanya RLS pada tahun 2006 dan 2009 saja yang terdapat pengaruh yang cukup dominan dengan APM. Hal ini disebabkan karena hasil korelasi RLS terhadap APM cukup kuat, yaitu memiliki hubungan pada tahun 2006 dan 2009. Hasil korelasi PPM terhadap APM juga cukup kuat, yaitu memiliki hubungan pada tahun 2012. Namun memiliki hubungan yang lemah pada tahun 2006.

Hasil korelasi RLP terhadap APM tidak cukup kuat, sehingga RLP tidak

memiliki pengaruh terhadap APM. Hal ini disebabkan karena hasil korelasi RLP terhadap APM dominan tidak memiliki hubungan jika dilihat dari hasil korelasi. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi APM yaitu rata-rata lama sekolah (RLS).

#### **4. Pemetaan *Scatterplot* Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat dengan Tiga Variabel Pendukung**

*Scatterplot* APM dengan RLP tahun 2006 menunjukkan terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 48.37–57.07) dengan klasifikasi kategori RLP tinggi (berada pada angka 22.36–27.84), yaitu D.K.I. Jakarta. Ada 2 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 30.97–39.66) dengan klasifikasi kategori RLP rendah (berada pada angka 11.37–16.86), yaitu Gorontalo dan Papua Barat. *Scatterplot* APM dengan RLP tahun 2009 menunjukkan terdapat 2 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.57–62.12) dengan klasifikasi kategori RLP tinggi (berada pada angka 23.76–27.04), yaitu Kepulauan Riau dan Maluku.

*Scatterplot* APM dengan RLP tahun 2009 menunjukkan bahwa ada 4 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 33.41–42.98) dengan klasifikasi kategori RLP rendah (berada pada angka 17.16–20.45), yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. *Scatterplot* APM dengan RLP tahun 2012 menunjukkan terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.10–63.55) dengan klasifikasi kategori RLP tinggi (berada pada angka 21.21–24.81), yaitu D.K.I. Jakarta. Tidak ada provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 29.16–40.62)

dengan klasifikasi kategori RLP rendah (berada pada angka 13.97–17.58).

*Scatterplot* APM dengan RLS tahun 2006 menunjukkan terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 48.37–57.07) dengan klasifikasi kategori RLS tinggi (berada pada angka 8.68–10.10), yaitu D.K.I. Jakarta. Ada 7 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 30.97–39.66) dengan klasifikasi kategori RLS rendah (berada pada angka 5.80–7.23), yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. *Scatterplot* APM dengan RLS tahun 2009 menunjukkan tidak ada provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.57–62.12) dengan klasifikasi kategori RLS tinggi (berada pada angka 9.48–10.90).

*Scatterplot* APM dengan RLS tahun 2009 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 33.41–42.98) dengan klasifikasi kategori RLS rendah (berada pada angka 6.60–8.03), yaitu Lampung, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. *Scatterplot* APM dengan RLS tahun 2012 menunjukkan terdapat 5 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.10–63.55) dengan klasifikasi kategori RLS tinggi (berada pada angka 9.11–10.60), yaitu D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan D.K.I. Jakarta. Ada 3 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 29.16–40.62) dengan klasifikasi kategori RLS rendah (berada pada angka 6.10–7.60), yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

*Scatterplot* APM dengan PPM tahun 2006 menunjukkan terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 48.37–57.07) dengan klasifikasi kategori PPM tinggi (berada pada angka 29.22–41.52), yaitu Maluku. Ada 4 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 30.97–39.66) dengan klasifikasi kategori PPM rendah (berada pada angka 4.57–16.89), yaitu Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. *Scatterplot* APM dengan PPM tahun 2009 menunjukkan terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.57–62.12) dengan klasifikasi kategori PPM tinggi (berada pada angka 26.24–37.53), yaitu Maluku.

*Scatterplot* APM dengan PPM tahun 2009 menunjukkan bahwa ada 7 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 33.41–42.98) dengan klasifikasi kategori PPM rendah (berada pada angka 3.62–14.92), yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. *Scatterplot* APM dengan PPM tahun 2012 menunjukkan tidak ada provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM tinggi (berada pada angka 52.10–63.55) dengan klasifikasi kategori PPM tinggi (berada pada angka 21.69–30.66). Terdapat 1 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi kategori APM rendah (berada pada angka 29.16–40.62) dengan klasifikasi kategori PPM rendah (berada pada angka 3.70–12.69), yaitu Kalimantan Barat.

## **5. Perbandingan Provinsi Berkategori APM Tetap Tinggi dan Tetap Rendah**

Provinsi yang memiliki klasifikasi kategori APM tertinggi dari yang tertinggi secara umum selama 3 periode tahun 2006, 2009, dan 2012 yaitu Nanggroe

Aceh Darussalam. Sedangkan provinsi yang memiliki klasifikasi kategori APM terendah dari yang terendah yaitu Nusa Tenggara Timur. Tingginya APM di Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan karena jarak ke sekolah yang cukup dekat dibuktikan dengan RLP yang rendah, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang cukup tinggi dibuktikan dengan RLS yang tinggi, dan penduduk miskin yang cukup rendah dibuktikan dengan PPM yang rendah.

Sebaliknya, rendahnya APM di Nusa Tenggara Timur disebabkan karena jarak ke sekolah yang cukup jauh dibuktikan dengan RLP yang tinggi, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang cukup rendah dibuktikan dengan RLS yang rendah, dan penduduk miskin yang cukup tinggi dibuktikan dengan PPM yang tinggi. Provinsi yang memiliki klasifikasi kategori APM tinggi yang dinilai dari data ketiga variabel bebas, dominan berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan provinsi yang memiliki klasifikasi kategori APM rendah yang dinilai dari data ketiga variabel bebas, dominan berada di bawah rata-rata nasional.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya antara lain :

1. Hanya ada 7 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang pendidikan SLTA sederajatnya hampir tercapai, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi tersebut memiliki APM kelas tinggi yang disebabkan karena akses ke sekolah mudah, tingginya pendidikan yang telah dicapai masyarakat di daerah tersebut, dan rendahnya jumlah penduduk miskin.
2. Hasil akhir dari ketiga tabel *coefficients* yang telah dianalisa, faktor dominan yang mempengaruhi angka partisipasi

murni (APM) yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Hasil korelasi antara APM dan RLS dominan cukup kuat, yaitu memiliki hubungan yang kuat dan berbanding lurus dengan APM pada tahun 2006 dan 2009, sehingga dapat sedikit ditarik kesimpulan yaitu bila APM naik maka RLS juga naik. Semakin tinggi RLS masyarakat di suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di daerah tersebut dan akan tercermin pada APMnya yang tinggi pada jenjang pendidikan tertentu.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang sekiranya bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Data *time series* yang digunakan di dalam penelitian ini masih terlalu pendek, sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel terikat (*independent variable*) dalam mempengaruhi variabel bebas (*dependent variable*). Perlunya penggunaan data *time series* yang lebih panjang/lama untuk mengetahui bagaimana pengaruh APM –salah satu ukuran akses dan pemerataan pendidikan- terhadap ketiga variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini dalam upaya penanganan akses dan pemerataan pendidikan di setiap provinsi Indonesia. Oleh karenanya

diperlukan studi lanjutan dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan dalam hal akses dan pemerataan pendidikan.

2. Pendidikan terkait akses dan pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap komponen seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus aktif terlibat. Beban biaya pendidikan tidak harus bertumpu pada anggaran pendidikan dari pemerintah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini berhubungan terhadap APM, sehingga pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Daerah) hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap variabel-variabel tersebut dan dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan akses dan pemerataan pendidikan di setiap provinsi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Statistik Pendidikan 2006 Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: CV. Petratama Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Statistik Pendidikan 2009 Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: CV. Petratama Persada.

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial – Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Statistik Pendidikan 2012 Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: CV. Petratama Persada.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi, 2007-2009 (Maret), 2010-2011, 2012 (Maret dan September)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses melalui <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>, 15 November 2014.
- Bappenas. 2013. *Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013*. Jakarta: Bappenas.
- Dalle, E. 1969. *Audiovisual Methods in Teaching, Third Edition*. New York: The Dryden Press; Holt, Rinehart and Winston.
- Gerakan Indonesia Berkibar. 2014. *Fakta Pendidikan: Setiap Menit, Empat Anak Putus Sekolah*. Jakarta: Komite Gerakan Indonesia Berkibar. Diakses melalui <http://indonesiaberkibar.org/id/fakta-pendidikan>, 5 Maret 2014.
- Kumalasari, M. dan Dwisetia P. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mendikdasmen. 2006. *Info Mendikdasmen: Pencapaian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, Edisi November 2006*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Bahan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasana, D. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P3Gender LPPM UNS. 2012. *Indikator Akses dan Pemerataan Pendidikan*. Surakarta: P3Gender LPPM UNS. Diakses melalui [http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com\\_content&view=article&id=108](http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=108), 11 Oktober 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UNDP. 2007. *Human Development Report. Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- UNESCO. 2011. *Education For All Global Monitoring Report: The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education*. Montreal: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Yunus, H.S. 2008. *Makalah: Konsep dan Pendekatan Geografi: Memaknai Hakekat Keilmuannya*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Zahidy, A.B. 2008. *Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan SMP (Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.